

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 2 0



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Angkutan Normal dengan Pembatasan

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencabut kebijakan pembatasan operasi angkutan publik LRT, MRT, dan Transjakarta yang pada Senin (16/3/2020) menimbulkan kepadatan penumpang dan antrean panjang. Hari ini, Selasa, layanan angkutan publik dipastikan normal dengan pembatasan jumlah penumpang.

Pembatasan tersebut lagi-lagi untuk menangkal persebaran virus SARS-CoV-2. "Untuk MRT, operasinya seperti semula. MRT mulai beroperasi dari pukul 05.00 sampai pukul 24.00," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo, Senin.

Senin kemarin, jumlah rangkaian MRT yang dioperasikan hanya empat sehingga membuat antrean panjang, seperti di Stasiun MRT Fatmawati. Hari Selasa ini, yang dioperasikan menjadi 16 rangkaian atau kembali normal.

Keberangkatan MRT jadi setiap 20 menit dari semula setiap 10 menit. Kapasitas penumpang juga dibatasi. Apabila biasanya satu rangkaian maksimum 1.200 orang, pada Selasa ini maksimum per rangkaian 360 penumpang.

Untuk LRT, kata Syafrin, juga sama. LRT Jakarta akan beroperasi mulai pukul 05.00 sampai pukul 23.00 dengan pembatasan jumlah penumpang. Biasanya ada 270 penumpang per rangkaian. Mulai Selasa, per rangkaian jadi 80 penumpang.

Untuk Transjakarta, Syafrin menjelaskan, bus akan kembali beroperasi 24 jam. Layanan malam hari kembali diadakan seperti biasa.

Senin kemarin, antrean mengular di halte-halte Transjakarta pada pagi hari ataupun sore hari. Selain minim sosialisasi dan terburu-buru, pembatasan operasi angkutan publik itu dinilai dipaksakan.

Senin pagi, Burhan (34), warga Petamburan, Jakarta Barat, berada di tengah antrean saat hendak berangkat kerja ke Blok M menggunakan bus Transjakarta dari Halte Slipi-Petamburan. Ia menunggu di luar halte, persisnya di pelataran jembatan penyeberangan orang yang terhubung ke halte.

Ia tak bisa merangsek masuk karena ada antrean penumpang di dalam halte. Sebagian penumpang mengenakan masker, sebagian tidak mengenakan.

Pengurangan rute untuk mengurangi interaksi warga menghadapi pandemi Covid-19 mungkin bagus. Namun, kata Burhan, waktu keberangkatan setiap 20 menit perlu dievaluasi. "Terlalu lama menunggu, malah terjadi penumpukan di halte karena belum semua kantor ada kebijakan kerja jarak jauh. Padahal, tujuannya (kebijakan) mengurangi interaksi," katanya.

Saat sore, penumpang Transjakarta kembali berjubel hampir tanpa jarak saat mengantre. Tidak sedikit di antara mereka yang tidak mengenakan masker pelindung muka, salah satu jalan masuk virus SARS-CoV-2 penyebab Covid-19.

"Lihat, tidak ada batasan jarak antarpemumpang saat antre dan saat ada di dalam bus," kata Andi Firmandi (28), karyawan swasta di kawasan MH Thamrin, saat pulang kerja menuju Ragunan, Jakarta Selatan.

Pembatasan operasi, katanya, menyebabkan kepadatan penumpang. Itu justru rawan penyebaran virus. Padahal, pembatasan dimaksudkan untuk *social distancing*, meminimalkan mobilitas manusia dan mengurangi risiko penularan.

Penumpang lain, Arie (32) dan Lala (29), sepakat jika pembatasan jam operasi angkutan umum justru membuat halte padat dan penumpang lain berebut masuk karena takut tidak kebagian bus.

Terkait pembatasan itu, Syafrin menegaskan, masih akan dilakukan di setiap bus. "Di Transjakarta ada pembatasan kapasitas penumpang, yaitu untuk *articulated bus*, bus gandeng semula kapasitas 150 menjadi hanya akan menampung 60 penumpang," jelasnya.

Untuk *single bus* hanya menampung 30 penumpang dari biasanya 80 penumpang.

Jaga jarak

Terkait antrean, Syafrin mengimbau agar pengguna angkutan umum terus menjaga jarak. Di halte bus, jika yang akan masuk bus gandeng, yang di dalam halte hanya dibolehkan sebanyak 60 orang.

"Selebihnya, kami imbau antre di luar halte dan menjaga jarak. Semuanya kita imbau untuk lencang depan satu lengan ke depan. Dengan pola ini, potensi penyebaran virus ini menjadi minimal, bahkan kita hilangkan," paparnya.

Pihak Dishub, kata Syafrin, akan menempatkan petugas dari Dinas Perhubungan dan juga dari satpol PP mulai Senin sore. Penempatan untuk mengatur masyarakat yang hendak antre di halte ataupun di stasiun.

Dengan layanan yang kembali normal tanpa pembatasan seperti Senin kemarin, rute-rute tertentu juga akan dilakukan penyesuaian.

"Kenapa perlu penyesuaian? Pada koridor-koridor yang biasa perjalanannya sangat tinggi, jumlah *demand*-nya sangat tinggi, tentu di sana kita tingkatkan juga suplainya," kata Syafrin.

Kebijakan itu sesuai temuan Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya, yang meminta Pemprov DKI mengevaluasi pengurangan frekuensi, waktu, dan cakupan layanan Transjakarta, MRT, dan LRT. "Ombudsman menemukan antrean panjang di Stasiun MRT Lebak Bulus dan

beberapa halte Transjakarta, seperti Ragunan dan Puri Beta 2 Ciledug," kata Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya Teguh P Nugroho.

Di tempat terpisah, pengamat tata kota Yayat Supriatna mengatakan, keputusan Pemprov DKI Jakarta membatasi layanan angkutan umum adalah terburu-buru dan tidak disertai kajian ataupun analisis detailnya. Ia tidak heran jika kebijakan itu membuat penumpukan dan antrean penumpang di halte-halte Transjakarta dan stasiun MRT.

Ia melihat kebijakan itu tidak didukung analisis tentang aspek transportasi secara detail. Saat jam sibuk pagi hari, rute mana yang sangat padat atau memiliki permintaan layanan tinggi, seharusnya Transjakarta bisa menyesuaikan jumlah armada yang dioperasikan.

"Seharusnya masyarakat diberi sosialisasi cukup mengenai perubahan-perubahan waktu

Bulan :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 0 2 0



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

dan pola layanan. Pemprov DKI juga harus menginformasikan bagaimana masyarakat melakukan perjalanan ketika jadwal dan pola berubah," katanya.

Idealnya bertahap

Pakar transportasi dari Universitas Indonesia, Ellen Tangkudung, memahami tindakan darurat yang diambil Pemprov Jakarta. Akan tetapi, memang-

kas operasi angkutan umum selalu kontraproduktif. Pengurangan hendaknya dilakukan bertahap sesuai perkembangan keadaan.

"Kalau unit-unit usaha sudah menjamin karyawannya bekerja dari rumah, baru jumlah armada angkutan umum bisa dikurangi karena otomatis penggunaannya berkurang," katanya. Untuk itu, perlu data jumlah pekerja di Jakarta yang mungkin tetap harus masuk kantor karena suatu alasan, misalnya diupah harian atau bekerja di sektor layanan publik.

Terkait hal ini, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Anton J Supit mengungkapkan sudah mengimbau para pelaku usaha menomorsatukan keselamatan karyawan. Meskipun begitu, ia mengakui level pekerjaan teknis seperti petugas pengelola gedung, petugas kebersihan, dan pegawai ritel tetap harus masuk bekerja.

Sementara itu, sosiolog perkotaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Henny Warsilah, mengatakan, sosialisasi bahaya penularan Covid-19 secara umum masih di permukaan. Indonesia memiliki budaya narasi dan dongeng tinggi yang memungkinkan pendidikan kesadaran jarak sosial maupun isolasi mandiri bisa sampai ke akar rumput.

(HLN/IGA/GIO/DAN/DNE)